



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Jl. Yos Sudarso No. 18 - 20 Surabaya - 60272
Telp. (031) 5463551 Fax. (031) 5463547

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2015

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan pasal 239 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Surat Walikota Surabaya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 150/4813/436.1.2/2015 tanggal 18 September 2015 perihal Pengajuan Daftar Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016.
 2. Surat Ketua DPRD Kota Surabaya Nomor 172/2878/436.5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016;
 3. Surat Komisi A DPRD Kota Surabaya Nomor 121/Kom A/Eks/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 perihal Usulan Judul Program Raperda;

4. Surat Komisi B DPRD Kota Surabaya Nomor 23/Komisi B/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016;
5. Surat Komisi C DPRD Kota Surabaya Nomor 074/KOM. C/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 perihal Usulan Raperda Usul Prakarsa;
6. Surat Komisi D DPRD Kota Surabaya Nomor 53/Komisi D/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 perihal Usulan Judul Program Pembentukan Perda Kota Surabaya Tahun 2016;
7. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Surabaya bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya tanggal 9 Nopember 2016;
8. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya tanggal 23 Nopember 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016**

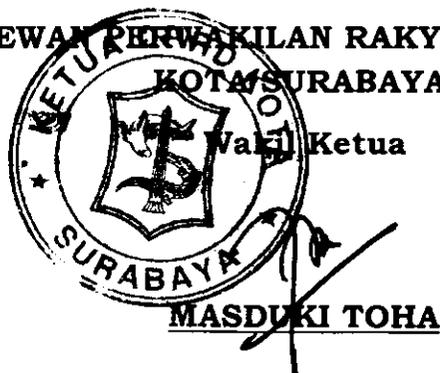
KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 dimaksud dalam diktum kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Nopember 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**



MASDUKI TOHA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KOTA SURABAYA
 NOMOR : 26 TAHUN 2015
 TANGGAL : 25 Nopember 2015

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	Ket.
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penataan Perumahan Kumuh dan atau Permukiman Kumuh;	Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan atau Permukiman Kumuh;	V			V	V	1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Cipta karya dan Pematusan; 3. Dinas Tanah dan Bangunan 4. Bag. Hukum	Prakarsa DPRD
2.	Penerapan Sistem Pajak Online terhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;	Online sistem dan transaksi usaha dan pelaporan serta pembayaran pajak secara online	V			V	V	1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Kebudayaan dan pariwisata 3. Dinas Pendapatan dan Keuangan daerah. 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Bag. Bina Program. 6. Bag. Hukum.	Prakarsa DPRD
3.	Kompensasi Pekerjaan Konstruksi terhadap Lingkungan Sekitar;	Pengelolaan dan Kompensasi dampak Pekerjaan Konstruksi terhadap Lingkungan Sekitar	V			V	V	1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Cipta karya dan Pematusan; 3. Dinas PU, Bina Marga; 4. Bag. Hukum; 5. Bag. Bina Program 6. Bag. Perlengkapan	Prakarsa DPRD
4.	Penyelenggaraan Perpustakaan dan Retribusi Parkir.	Penyelenggaraan Perpustakaan dan Retribusi Parkir .	V		1. UU. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	Prakarsa DPRD

					Retribusi Daerah; 2. PP No 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing			3. Dinas Perhubungan; 4. UPTD Parkir; 5. Bag. Hukum.	
5.	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)	V			V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Sosial; 3. Dinas Perhubungan; 4. Bag. Bina Program; 5. Bag. Hukum	Prakarsa DPRD
6.	Bantuan Hukum Pemerintahan Daerah Kota Surabaya	Bantuan Hukum Pemerintahan Daerah Kota Surabaya	V	-	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 3. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	1. Asisten Sekda 2. Inspektorat 3. Bag. Hukum 4. Bag. Pemerintahan 5. Satpol PP 6. Bakesbang Linmas 7. BKD 8. Ortala 9. Sekretaris DPRD	Prakarsa DPRD (BPP)
7.	Ijin dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	Ijin dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	V						Prakarsa DPRD Kom. (A)
8.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Tempat	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Tempat	V						Prakarsa DPRD Kom. (B)

	Hunian Berimbang	Hunian Berimbang						
9.	Pembatasan Angkutan Kelas Jalan dan/atau Klasifikasi Jalan	Pembatasan Angkutan Kelas Jalan dan/atau Klasifikasi Jalan	V					Prakarsa DPRD Kom. (C)
10.	Perlindungan Makanan	Perlindungan Makanan	V					Prakarsa DPRD Kom. (D)
11.	Pembentukan Badan Usaha Milik Rukun Warga (BUM-RW) dan Pasar Uang Intern Badan Usaha Milik Warga (PUBUM-RW)	Pembentukan Badan Usaha Milik Rukun Warga (BUM-RW) dan Pasar Uang Intern Badan Usaha Milik Warga (PUBUM-RW)	V					Prakarsa Anggota DPRD / BPP
12.	tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Pelayanan Pembinaan dibidang Ketenagakerjaan	V		1. UU. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. PP. Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	V	1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Tenaga Kerja; 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5. Kantor Imigrasi; 5. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;	Prakarsa DPRD
13.	Upaya Kesehatan Daerah	Upaya Kesehatan Daerah	V		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	V	1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.	Prakarsa DPRD
14.	Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Surya Artha	Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Surya Artha Utama	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman	V	1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Koordinasi dan Pelayanan Penanaman	Prakarsa DPRD

	Utama				Modal			Modal; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	
15.	Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Jatim	Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Jatim	V		Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		1. Badan Perencanaan Pembanguna; 2. Badan Koordinasi dan Pelayanan Penanaman Modal; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	Prakarsa DPRD
16.	Izin Mendirikan Reklame dan Pajak Reklame	Izin Mendirikan Reklame dan Pajak Reklame	V		Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V		1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Prakarsa DPRD
17.	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Surabaya	V		1. UU. Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 2. PP. Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaa n Kualitas Air dan Pengendal ian Pencemar an Air;	V		1. Badan Perencanaa n Pembangun an; 2. Badan Lingkungan Hidup.	Usulan Pemda
18.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi	Penyesuaian ketentuan pungutan retribusi daftar ulang izin gangguan			Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V		1. Badan Perencanaa n Pembangun an; 2. Badan Lingkungan Hidup; 3. Dinas Pendapatan	Usulan Pemda

	Izin Gangguan							dan Pengelolaan Keuangan	
19.	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan ; 2. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 3. Kecamatan; 4. Kelurahan	Usulan Pemda
20.	Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Perizinan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	V		1. UU. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. PP. Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 5. Kep. Menperind	V		1. Dinas Perhubungan; 2. Badan Lingkungan Hidup; 3. Badan Perencanaan Pembangunan.	Usulan Pemda

					ag Nomor KM.551/M PP/Kep/10 /1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Kep. Menperind ag. Nomor KM.191/M PP/Kep/6/2001.				
21.	Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum	Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum	V		1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 3. Kep. Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.			1. Dinas Perhubungan; 2. Badan Lingkungan Hidup; 3. Badan Perencanaan Pembangunan.	Usulan Pemda
22.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Penyesuaian ketentuan pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	Usulan Pemda

	Kota Surabaya								
23.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok	Penambahan Kawasan Tanpa Rokok yang semula 5 (lima) kawasan menjadi 7 (tujuh) kawasan		V	Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 	Usulan Pemda
24.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah	V	V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 	Usulan Pemda
25.	Izin Pemakaian Tanah	Peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah	V				V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 	Usulan Pemda
26.	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Koordinasi dan Pelayanan Penanaman Modal; 	Usulan Pemda

								3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	
27.	Pembangunan Jaringan Utilitas Terpadu di Kota Surabaya	pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas di Kota Surabaya	V		Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010		V	1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 3. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.	Usulan Pemda
28.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Penyempurnaan & penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	Usulan Pemda
29.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penyempurnaan & penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	Usulan Pemda
30.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Penetapan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	V		Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol		V	1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan Pemda

31.	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi	V			V	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		Usulan Pemda
32.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penyempurnaan tujuan, kinerja dan organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	V	V	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011	V	1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Pasar Surya;		Usulan Pemda
33.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011	V	1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.		Usulan Pemda

34.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada. 	Usulan Pemda
35.	Zonasi Pesisir Kota Surabaya	Zonasi Pesisir Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan. 	Usulan Pemda
36.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021	V		Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	V		Badan Perencanaan Pembangunan	Usulan Pemda
37.	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	V			V		Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	Usulan Pemda

	Lain untuk Jalan								
38.	Rumah Susun	Pengaturan Rumah Susun	V		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	V		1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;	Usulan Pemda
39.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Penambahan obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan	V		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V		1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	Usulan Pemda
40.	Rencana Detail Tata Ruang Kota	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota					V	1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.	Usulan Pemda
41.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	V			V		3. Badan Perencanaan Pembangunan; 4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. 5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Usulan Pemda

42.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Lingkungan Hidup; 2. Dinas Kebakaran; 3. Dinas Perhubungan; 4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 6. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. 	Usulan Pemda
43.	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Pencabutan keseluruhan substansi dalam Peraturan Daerah	V			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Kebakaran; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 	Usulan Pemda
44.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peninjauan struktur dan besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 	Usulan Pemda
45.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan	Penyesuaian dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-		V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendidikan; 3. Dinas 	Usulan Pemda

raan Pendidikan	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015			diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015			Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 4. Bagian Bina Program.	
-----------------	--	--	--	---	--	--	---	--

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

46.	1	Rancangan Peraturan Daerah akibat putusan Mahkamah Agung							Usulan Pemda
	2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah							
	3	Rancangan Peraturan Daerah akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Timur							
	4	Rancangan Peraturan Daerah akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan							

SURABAYA, 25 Nopember 2015



 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SURABAYA
 Wakil Ketua
 MASDUKI TOHA